

**TANTANGAN KEPEMIMPINAN
DALAM MEMANFAATKAN BONUS DEMOGRAFI**

Wartiningsih

Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

e-mail: wartiningsih2@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran pentingnya kepemimpinan dalam memanfaatkan bonus demografi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam kebijakan kependudukan dan pemanfaatan bonus demografi. Hasilnya pemimpin organisasi memerlukan jiwa kepemimpinan dengan memperhatikan program kependudukan. Kemajemukan dan keragaman penduduk yang beraneka banyak dapat dipandang dari dua sisi: sebagai modal pembangunan atau tantangan pembangunan. kesadaran pemerintah untuk menjadikan penduduk sebagai pusat pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran yang telah terbangun ini membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menindaklanjutinya menjadi aksi nyata sebab setiap daerah akan mengalami *window of opportunity* dan bonus demografi kedua yang berbeda.

Kata Kunci: *tantangan, kepemimpinan, bonus demografi*

CHALLENGES OF LEADERSHIP IN UTILIZING DEMOGRAPHY BONUS

Wartiningsih

BKKBN Representative of the Special Region of Yogyakarta

e-mail: wartiningsih2@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to get an idea of the importance of leadership in utilizing demographic bonuses. The research method used is the study of literature from journals and books relating to leadership in population policy and the use of demographic bonuses. As a result, organizational leaders need leadership skills by paying attention to population programs. The diversity and diversity of a diverse population can be viewed from two sides: as a development capital or a development challenge. government awareness to make the population as central in sustainable development. This awakening awareness requires a serious commitment from the government to follow it up into concrete actions. Because each region will experience a different window of opportunity and demographic bonus.

Keywords: challenges, leadership, demographic bonuses

PENDAHULUAN

Penyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 diperlukan pembangunan pendidikan dalam perspektif masa depan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi (Kemendikbud, 2017).

Dalam rangka menyongsong Generasi Emas 2045, bonus demografi perlu disikapi dengan baik. Pembangunan manusia Indonesia harus didukung dengan kebijakan pengendalian penduduk yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan penyebaran penduduk. Selain pengendalian pertumbuhan penduduk, pemerataan sebaran penduduk harus dilakukan agar tidak terpusat di sentra-sentra pembangunan ekonomi tertentu. Angka urbanisasi harus dapat ditekan. Kebijakan kependudukan harus dilaksanakan seiring dengan kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi dan desentralisasi (Kemendikbud, 2017).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam kebijakan kependudukan dan pemanfaatan bonus demografi. Hasil berbagai tinjauan literatur akan digunakan untuk mengidentifikasi tantangan kepemimpinan dalam memanfaatkan bonus demografi menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan

Kepemimpinan mengaitkan aspek individual seorang pemimpin dengan konteks situasi di mana pemimpin tersebut menerapkan kepemimpinan. Kepemimpinan juga bersifat kolektif dalam arti segala perilaku yang diterapkan seorang pimpinan akan memiliki dampak luas bukan bagi dirinya sendiri melainkan seluruh anggota organisasi. Sebelum memasuki materi kepemimpinan, perlu terlebih dahulu dibedakan konsep pemimpin (*leader*) dengan kepemimpinan (Hajar, 2018).

Pemimpin merupakan individu yang dapat mempengaruhi anggota kelompok maupun organisasi untuk mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuannya. Pemimpin

menunjuk pada personal atau individu spesifik atau kata benda. Sementara itu, kepemimpinan adalah sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya guna mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuannya, Lussier, (2010). Ada berbagai gaya kepemimpinan. Gaya pemimpin mempengaruhi perilaku pemimpin. Perilaku pemimpin benar-benar membuat gaya pemimpin. Sebuah perilaku menampilkan pemimpin otokratis berbeda dari seorang pemimpin yang demokratis. Hubungan manusia antara pemimpin dan pengikut akan berbeda sesuai dengan gaya kepemimpinan, Lussier (Hajar, 2018).

Definisi kepemimpinan yang ditawarkan para ahli di bidang organisasi dan manajemen. Masing-masing memiliki perspektif dan metodologi pembuatan definisi yang cukup berbeda, bergantung pada pendekatan (epistemologi) yang mereka bangun guna menyelidiki fenomena kepemimpinan. Stephen Robbins, misalnya mendefinisikan kepemimpinan sebagai “*... the ability to influence a group toward the achievement of goals*”. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan, Lussier (Hajar, 2018).

Indonesia dalam Ancaman Ledakan Penduduk?

Dewasa ini Indonesia dihuni sedikitnya oleh 237,6 juta jiwa penduduk. Mereka tersebar dari Sabang sampai Merauke (data BPS 2010). Persebarannya tidak merata antar satu wilayah dengan wilayah lain. Sebagian besar penduduk menyemut di Pulau Jawa. Kemajemukan dan keragaman penduduk yang beraneka banyak dapat dipandang dari dua sisi: sebagai modal pembangunan atau tantangan pembangunan (Sara, 2018).

Tantangan tersebut meliputi permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan utamanya berkaitan jumlah yang sangat besar dan terus meningkat, persebarannya yang tidak merata, atau kualitas penduduk rendah, kemiskinan dan angka pengangguran tinggi, tingkat pendidikan rendah, polusi, dan segudang permasalahan lainnya.

Di Indonesia, beberapa permasalahan kependudukan tersebut muncul tanpa bisa ditolak. Pengendalian pertumbuhan penduduk memang bukan sebatas persoalan Indonesia saja. Pada akhir 2011, PBB mengumumkan penduduk dunia telah mencapai tujuh miliar. Jumlah yang demikian besar, berdasarkan tiga skenario pertambahan. Jika pilihannya dengan pertambahan yang rendah, upaya pengendalian penduduk harus dilakukan mulai sekarang. Apa yang dilakukan saat ini akan menentukan masa depan dan bisa menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik.

Bukankah penduduk membutuhkan makanan, lahan untuk tinggal, dan kebutuhan primer dan sekunder. Semua kebutuhan itu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ironisnya, luas bumi terbatas. Jika penduduk tidak dikendalikan, bumi suatu saat tidak akan mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup penduduk. Bayangkan, dari seluruh luas bumi, hanya 17 persen yang bisa dan layak dihuni.

Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi akan menyebabkan tekanan penduduk terhadap lahan menjadi meningkat. Nilai tekanan penduduk yang sudah mencapai ambang batas akan berpotensi menimbulkan beberapa ancaman permasalahan seperti konflik agraria, konflik politik, kelaparan, kemiskinan, sulitnya mencari kerja, bencana alam, dan masalah lainnya.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan PBB, penduduk Indonesia tahun 2050 masih menjadi penyumbang terbesar jumlah penduduk dunia. Pasalnya, pada 2050 Indonesia menjadi negara keenam di dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Hal itu menggambarkan bahwa pertambahan penduduk di Indonesia masih tinggi, berpotensi menjadi ledakan bila tidak dikelola dengan baik. Posisi Indonesia itu membawa konsekuensi. Satu di antaranya pemerintah harus memperkuat kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk. PBB telah menyalakan alarm kependudukan bagi Indonesia untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi dan ancaman kependudukan di negeri ini.

Perencanaan sektoral dalam kependudukan (pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, pangan, dan lainnya) harus disiapkan. Ini agar tingginya jumlah penduduk yang mungkin terjadi pada 2050 tidak bermuara pada permasalahan. Sejatinya justru menuju terciptanya tujuan pembangunan seperti usia harapan hidup dan sehat, lebih berpendidikan, dan lebih terampil (Sara, 2018).

Bonus Demografi dan *Window of Opportunity*

Bonus demografi terjadi pada saat Dependency Ratio pada titik/angka terendah yaitu dibawah 50, yang artinya setiap 100 orang/penduduk usia produksi hanya menanggung kurang dari 50 orang/penduduk usia non produktif. Untuk mencapai Bonus Demografi suatu negara memerlukan waktu yang cukup panjang. Adanya perubahan struktur penduduk yang menyebabkan jumlah penduduk usia produktif menjadi jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non produktif . Bonus demografi merupakan kesempatan langka yang dialami suatu negara, karena hanya akan terjadi 1 kali atau 2 kali dalam sejarah perjalanan penduduk (Dewi, 2018).

Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh *dependency ratio* akibat penurunan kematian bayi dan fertilitas (kelahiran) jangka panjang. Penurunan proporsi penduduk muda (0-14 tahun) serta besarnya proporsi penduduk produktif (15-64 tahun) mengurangi biaya investasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga biaya ini dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. (Dewi, 2018).

Puncak bonus demografi di Indonesia adalah tahun 2020-2030, dan setelah itu bonus demografi berangsur angsur meninggalkan Indonesia, karena dependency ratio akan meningkat lagi. Pada tahun 2020-2030 depedency ratio terendah akan dicapai Indonesia yaitu 46,9 yang artinya 100 penduduk usia produktif hanya akan menanggung 46,9 penduduk non produktif. Dependency ratio Indonesia perlahan lahan akan naik kembali menjadi 47,3 di tahun 2035 dan seterusnya , karena jumlah penduduk non produktif terutama usia lanjut (65+) meningkat (Dewi, 2018).

Karena sejak tahun 2015 Indonesia telah masuk ke era bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif sangat banyak. Penduduk usia produktif ini adalah merupakan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Indonesia. Tenaga kerja yang jumlahnya meningkat ini dapat dimanfaatkan apabila mereka terdidik, terampil, sehat dan ada lapangan pekerjaannya. Pemerintah Indonesia sedang memacu pendidikan dan ketrampilan pemuda pemuda Indonesia yang nanti pada tahun 2020-2030 adalah merupakan tenaga kerja. Pendidikan Indonesia ditingkatkan dari yang rata-rata SMP menuju rata-rata SMA sederajad yaitu dengan digiatkannya program wajib belajar 12 tahun.Untuk menyiapkan tenaga terampil disiapkan sekolah sekolah kejuruan (SMK) dan balai balai pelatihan bagi yang putus sekolah sebelum 12 tahun wajib belajar. Disisi lain kesehatan para penduduk juga diperhatikan yaitu adanya jaminan kesehatan nasional (Dewi, 2018).

Pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah berusaha menciptakan 10 juta lapangan kerja baru, dimana pada tahun 2014 terserap 2,6 juta tenaga kerja baru, disusul 2,8 juta tenaga kerja barudi tahun 2015, lalu 2,4 juta tenaga kerja baru di tahun 2016 dan 2,6 juta tenaga kerja baru di tahun 2017 (Kompas, 2018). Selain itu individu individu Indonesia mulai kreatif dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri di sektor ekonomi/industri kreatif. Perempuan yang semakin berpendidikan dan efek suksesnya program KB, ikut meramaikan pasar kerja yang ada (Dewi, 2018).

Kalau semua ini berjalan baik, maka Indonesia akan memperoleh manfaat dari bonus demografi atau Indonesia mendapat anugerah dari bonus demografi. Penduduk produktif yang jumlahnya banyak mempunyai pekerjaan, baik itu penduduk laki-laki atau perempuan. Mereka berpendidikan dan sehat sehingga mereka produktif. Artinya mereka secara maksimal dapat menghidupi diri mereka sendiri dan mereka juga dapat menanggung penduduk yang non produktif. Karena tingkat produktivitas mereka tinggi dan mereka memperoleh penghasilan yang baik (maksimal) maka penghasilan mereka berlebih. Kelebihan penghasilan ini dapat diinvestasikan untuk keperluan yang lain, misalnya peningkatan pendidikan dan peningkatan kesehatan. Dapat pula kelebihan penghasilan ini dinvestasikan untuk usaha-usaha yang mendatangkan penghasilan lain. Dengan demikian Indonesia mendapat keuntungan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi yang terpacu dan penduduk yang lebih sejahtera. Inilah anugerah untuk Indonesia bila bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Bonus demografi di Indonesia selain dapat menjadi anugerah dapat pula menjadi suatu petaka. Bila bonus demografi di Indonesia yang dinikmati tahun 2020-2030 tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia, maka Indonesia akan mendapat petaka. Indonesia tidak akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, Indonesia masyarakatnya tidak akan lebih sejahtera, bahkan akan menjadi beban bagi negara Indonesia.

Dari sisi pendidikan, menurut sensus penduduk tahun 2000 pendidikan pekerja di Indonesia terbesar adalah sekolah dasar. Begitu pula yang mencari kerja. Dengan rata-rata pendidikan di Indonesia baru sampai SMP tampaknya akan susah para penduduk usia produktif ini mencari kerja khususnya untuk sektor formal sehingga pada akhirnya mereka akan terlempar ke sektor informal. Kalaupun mereka tidak masuk sektor informal, maka mereka kan menjadi penganggur. Penganggur akan menjadi beban bagi negara. Menurut harian Kompas, November 2016 mengenai pengangguran terbuka susut, data di Indonesia menunjukkan pertumbuhan sektor industri minim sementara penduduk usia produktif yang pendidikan nya SMA sederajat banyak yang ingin masuk ke sektor industry dan tidak tertampung. Akhirnya mereka menjadi penganggur, untuk membuka usaha sendiri mereka tidak mempunyai modal.

Tampaknya pemerintah harus berusaha memperbaiki tingkat pendidikan para penduduk usia produktif ini. Semoga belum terlambat. Ada lagi yang menghambat terserapnya penduduk usia produktif ke pasar kerja. Sejak tahun 2015 Indonesia setuju untuk ikut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Maka angkatan kerja Indonesia (usia produktif Indonesia) harus bersaing

juaga dengan angkatan kerja anggota MEA lain. Lahan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia diperebutkan bukan hanya oleh orang-orang/pekerja Indonesia tapi juga oleh pekerja dari negara ASEAN lain. Dan yang dikhawatirkan pekerja Indonesia akan kalah bersaing karena tingkat pendidikan yang tidak setinggi pekerja dari negara ASEAN lain. Kembali lagi mereka akan menjadi pengangguran yang berarti beban bagi negara (Dewi, 2018).

Akhir akhir ini kita dikhawatirkan akan serbuan TKA (Tenaga Kerja Asing) khususnya dari Tiongkok. Mereka seakan akan merebut juga lapangan pekerjaan penduduk produktif Indonesia. Mereka masuk dengan mudah ke Indonesia karena efek dari peraturan Presiden no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja Asing, dimana peraturan presiden ini menyatakan untuk membuka dan memperbaiki sistem investasi di Indonesia. Tetapi seharusnya sesuai dengan peraturan presiden ini Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia adalah yang merupakan expert atau tenaga ahli sehingga mereka dapat mentransfer teknologi dan informasi ke pekerja Indonesia. Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia bukanlah buruh kasar yang ternyata banyak juga terlihat bekerja di tambang-tambang di Indonesia. Lalu bagaimana pekerja Indonesia dapat bekerja bila untuk buruh kasar pun sudah dimasuki Tenaga Kerja Asing. Artinya akan terjadi pengangguran kembali yang implikasinya adalah beban lagi bagi negara (Dewi, 2018).

Selain dari sisi pendidikan, sisi kesehatan juga memegang peranan penting untuk menyiapkan penduduk usia produktif. Penduduk yang sehat tentu produktivitasnya akan tinggi. Jadi untuk menyiapkan penduduk usia produktif yang sehat harus dimulai simulai sejak di dalam kandungan. Kondisi Indonesia sebelum tahun 2000 adalah tingkat kematian ibu dan tingkat kematian bayi tinggi. Cermin kesehatan yang belum baik. Ada lagi ditemukan anak-anak kurang gizi dan stunting (pendek/kerdil). Hingga tahun 2010 pun masih ditemukan kondisi ini. Anak-anak yang kurang gizi dan stunting adalah anak-anak yang tumbuh kembangnya tidak maksimal sehingga secara kecerdasan mereka kalah dari anak-anak yang cukup gizi. Akibatnya mereka kurang produktif (karena pendidikannya tidak tinggi dan kesehatannya terganggu). Bila tidak produktif tentunya mereka akan kalah bersaing. Bisa jadi mereka menjadi beban juga bagi negara. Belum lagi sebuah narkoba ke Indonesia, yang efeknya sangat merusak kesehatan (Dewi, 2018).

Bonus demografi seperti pedang bermata dua. Disatu sisi menguntungkan (sebagai peluang) bila penduduk usia produktif tersebut mempunyai pendidikan dan ketrampilan yang memadai serta bekerja atau mempunyai usaha produktif. Sebaliknya jika penduduk usia produktif tersebut mempunyai pendidikan yang rendah dan tidak produktif, mereka tidak pantas disebut

sebagai bonus tetapi lebih tepat sebagai beban (menjadi bencana) (Rimbawan, 2014).

Bonus demografi harus dioptimalkan semaksimal mungkin demi pertumbuhan ekonomi melalui investasi sumber daya manusia yang modern. Ledakan penduduk usia kerja ini akan memberikan keuntungan ekonomi apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1) Penawaran tenaga kerja (*labor supply*) yang besar meningkatkan pendapatan per kapita jika mendapat kesempatan kerja yang produktif. 2). Adanya peranan perempuan, yaitu jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja dan membantu peningkatan pendapatan. 3). Adanya tabungan (*savings*) masyarakat yang diinvestasikan secara produktif. 4). Modal manusia (*human capital*) yang berkualitas jika ada investasi untuk itu (Jati, 2015).

Dalam kajian demografi, Indonesia saat ini dapat dikatakan sedang mengalami masa bonus demografi. Masa ini ditandai dengan kenaikan dua kali lipat jumlah penduduk usia produktif yang diiringi dengan penundaan pertumbuhan usia penduduk muda dan semakin sedikit jumlah penduduk manula (Wasisto, 2015). Dengan kata lain, masa ini terjadi penurunan rasio ketergantungan/dependency ratio dari penduduk Indonesia. Sementara itu, Indonesia diperkirakan akan mendapat *window of opportunity* pada 2020–2030, yaitu ketika *dependency ratio*-nya berada pada tingkat terendah sepanjang masa transisi demografi (Heryanah, 2015).

Bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan proporsi penduduk muda yang mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 dan proyeksi penduduk Indonesia didapat rasio ketergantungan (*dependency ratio*) seperti yang disajikan. Secara total, rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada 2010 sebesar 50,5 persen. Hal ini berarti setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung sebanyak 50-51 orang yang belum dan tidak produktif lagi. Angka ketergantungan tersebut disumbang oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 43 persen dan rasio ketergantungan tua sebesar 7,5 persen. Dari komposisi jumlah penduduk tersebut, dapat dilihat bahwa di Indonesia pada 2010 rasio antara mereka yang termasuk kategori usia produktif dua kali lipat daripada mereka yang terkategori penduduk yang tidak produktif. Jika dibandingkan, usia produktif tahun 2010 lebih banyak menanggung penduduk usia muda dibandingkan dengan penduduk usia tua. Tahun 2015 *dependency ratio* nasional berada pada angka 48,6. Jika mengacu pada data hasil dari proyeksi penduduk Indonesia, pada 2025 mendatang

Indonesia akan mencapai *window of opportunity* dan di tahun inilah diprediksikan *dependency ratio* dari Indonesia merupakan angka *dependency ratio* yang terendah. Berdasarkan data proyeksi penduduk per provinsi, maka *window of opportunity* ini tidak akan dialami secara serentak oleh provinsi. Ada beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami peluang lebih cepat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Namun ada beberapa provinsi yang diproyeksikan belum akan mengalaminya walaupun telah melewati tahun 2035. Sebagian besar provinsi di Indonesia telah memasuki masa bonus demografi pada 2010. Terdapat 12 provinsi yang telah memasuki masa *window of opportunity* ini, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DIY, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara (Heryanah, 2015).

Provinsi yang diprediksikan memasuki masa *window of opportunity* tahun 2015 adalah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Papua Barat, dan Provinsi Papua. Pada 2020 Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah diprediksikan baru akan memasuki masa *window of opportunity*. Sementara itu, Provinsi NAD, NTB, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan memasuki masa ini pada 2030. Kemudian terdapat tujuh provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara, yang diprediksikan belum akan memasuki *window of opportunity* sebelum tahun 2035 (Heryanah, 2015).

Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua

Pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini memberikan dampak yang positif dengan meningkatnya kualitas kesehatan dan keadaan sosial masyarakat Indonesia. Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat Indonesia tergambar dari menurunnya tingkat kematian ibu, bayi, dan anak, juga semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia. Jika melihat dari data BPS, angka harapan hidup penduduk Indonesia periode tahun 2010-2015 telah mencapai 70,1 tahun. Angka ini telah jauh meningkat dari tahun 2000 yang hanya mencapai 65,5 tahun, bahkan pada 1970-an angka harapan hidup masyarakat Indonesia hanya mencapai 47 atau 48 tahun (Heryanah, 2015).

Konsekuensi dari semakin membaiknya angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah akan semakin banyaknya jumlah penduduk yang dikategorikan lanjut usia (lansia). Jumlah penduduk Indonesia yang termasuk kategori usia 65 tahun ke atas berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 sebesar 11,8 juta jiwa atau sekitar 5 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 238,5 juta jiwa, bahkan jika dengan menggunakan ukuran usia lanjut dari mulai usia 60 tahun ke atas, jumlah lansia di Indonesia tahun 2010 mencapai 18,1 juta atau sebesar 7,56 persen. Jumlah sebesar itu menjadikan Indonesia sebagai urutan kelima dengan jumlah lansia terbanyak di dunia (Heryanah, 2015).

Walaupun bukanlah masalah yang mendesak, Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi permasalahan penuaan penduduk. Karena saat hal tersebut terjadi, berarti beban yang ditanggung para usia produktif akan sangat berat. Pemerintah harus menyiapkan program-program yang mendukung kondisi kependudukan dengan karakteristik tersebut, seperti penyediaan jaminan sosial, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Sejak dulu pemerintah perlu merancang desain kebijakan kependudukan yang bersifat population responsive (Heryanah, 2015).

Negara-negara maju yang telah lebih dulu mengalami ageing population mempersiapkan program-program pembangunannya jauh sebelum kondisi itu terjadi. Dengan demikian, ketika mereka telah berada pada kondisi penuaan penduduk, perekonomian mereka justru mendapatkan keuntungan karena penduduk yang berusia lanjut ini masih sehat, produktif, dan masih memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Program-program pembangunan yang terbukti telah menjadikan mereka yang dikategorikan sebagai penduduk usia tuanya dapat beraktivitas secara ekonomi lebih lama dan bukan menjadi bahan tanggungan bagi keluarga dan negara (Heryanah, 2015).

Pemerintah Indonesia harus bersiap diri sehingga penuaan penduduk di masa mendatang ini menjadi apa yang disebut dengan ‘bonus demografi kedua’. Bonus demografi kedua berarti proporsi penduduk yang berusia tua di suatu negara cukup banyak (walau belum ada pembahasan mengenai seberapa banyak proporsi penduduk yang berusia tua agar dapat dikatakan suatu negara mendapat bonus demografi kedua). Penduduk tua ini pun memiliki kesehatan dan pendidikan yang memadai sehingga masih produktif dalam perekonomian dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Sekali ini Indonesia berpotensi mendapatkan bonus kedua dari keadaan struktur masyarakatnya jika para lansia masih produktif dan menyumbang pertumbuhan ekonomi (Heryanah, 2015).

Implikasi Ekonomi dan Kebijakan di Bidang Kependudukan di Masa Mendatang

Dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah, pemahaman mengenai kondisi penduduk memegang peranan sangat penting. Ketersediaan data kependudukan yang terpercaya akan memudahkan para perumus pembangunan menentukan rencana-rencana strategis mereka, misalnya perencanaan dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, permukiman, dan lingkungan, yang diperuntukkan bagi masyarakatnya. Pemahaman yang baik mengenai kependudukan, seperti struktur, laju pertumbuhan penduduk, dan rasio jenis kelamin, dapat digunakan untuk sebagai dasar rencana pembangunan di suatu wilayah ke depannya (Heryanah, 2015).

Di negara-negara maju, topik mengenai penuaan penduduk telah mulai ramai dibahas sejak awal abad 21. Jepang dan Korea merupakan dua negara yang perkembangan penduduk tuanya paling pesat dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Di kedua negara tersebut, kebijakan dan program-program yang berkenaan dengan penuaan penduduk dan penduduk usia tua telah aktif dilaksanakan sejak lama. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Indonesia telah siap menghadapi masa tersebut? Bandingkan dengan Singapura yang telah memasuki penuaan penduduk terlebih dulu. Dengan pendapatan per kapita penduduk Singapura yang jauh lebih tinggi, negara tersebut telah mampu menjalankan program-program pembangunan yang berbasiskan kependudukan dan memperhatikan kondisi struktur kependudukannya. Bagaimana kasusnya dengan Indonesia? (Heryanah, 2015).

Walaupun peluang bonus demografi kedua akan terjadi di Indonesia, sepertinya agak sulit diharapkan, kecuali ada usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk mencapainya.

Dikatakan kurang rasional jika kita mengharapkan bonus ini karena faktanya dapat dilihat dari beberapa data. Berdasarkan data Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012, sebesar hampir 30 persen penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), pada Agustus 2014 sekitar 68,1 juta atau hampir 60 persen dari pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal (Berita Resmi Statistik, November 2014). Perpaduan dari pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang dominan di sektor informal berkonsekuensi terhadap penghasilan mereka yang juga rendah. Penghasilan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu menyisihkan sebagian penghasilan mereka sebagai simpanan mereka untuk saat pensiun atau menyisihkan sebagian penghasilan untuk ikut serta dalam asuransi kesehatan ataupun dana pensiun. Mereka ini minim perlindungan sosial (Heryanah, 2015).

Pada 2050 diperkirakan *dependency ratio* Indonesia akan naik kembali karena jumlah mereka yang berkategori lanjut usia akan semakin banyak. Jika mereka ini tidak mempunyai tabungan ketika masih produktif dan tidak mempunyai perlindungan asuransi, maka dikhawatirkan beban bagi Pemerintah Indonesia akan semakin meningkat. Untuk mendapatkan penduduk usia lanjut yang produktif, diperlukan program-program pembangunan yang berbasis kependudukan dan program itu bersifat jangka panjang. Manfaat dari program pembangunan ini tidak langsung dapat dirasakan, misalnya dengan pembangunan yang mengutamakan peningkatan sumber daya. Pembangunan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan di sebuah wilayah. Hal ini karena besarnya jumlah penduduk yang berkualitas akan menjadi modal pembangunan dan sebaliknya, banyaknya jumlah penduduk dapat menjadi beban dari suatu pemerintahan jika kualitas penduduknya rendah (Heryanah, 2015).

Di dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, telah tercermin kesadaran pemerintah untuk menjadikan penduduk sebagai sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran yang telah terbangun ini membutuhkan komitmen yang serius dari pemerintah untuk menindaklanjutinya menjadi aksi-aksi yang nyata. Karena setiap daerah akan mengalami *window of opportunity* dan bonus demografi kedua yang berbeda, maka diperlukan respons kebijakan dengan fokusnya masing-masing pada kebijakan pembangunan yang berbasis pada kependudukan sehingga momentum bonus demografi tidak terlewatkan.

Program pembangunan di bidang kesehatan yang menyiapkan penduduk yang sehat dan tidak gampang sakit sehingga mereka yang nantinya masuk usia tua tetap akan sehat. Dengan kesehatan yang baik, mereka masih dapat produktif dalam perekonomian negara. Tidak hanya menyiapkan masyarakat yang tidak gampang sakit, tetapi negara juga harus melindungi mereka dengan asuransi kesehatan yang menjadi pengaman masyarakat ketika mereka sakit. Selain itu, dari sisi masyarakat, harus terus digalakkan program kesadaran menabung atau mengikuti program dana pensiun yang dapat menjadi sandaran ketika masa pensiun telah datang (Heryanah, 2015).

KESIMPULAN

Kemajemukan dan keragaman penduduk yang beraneka banyak dapat dipandang dari dua sisi: sebagai modal pembangunan atau tantangan pembangunan. Kalau semua ini berjalan baik, maka Indonesia akan memperoleh manfaat dari bonus demografi atau Indonesia mendapat anugerah dari bonus demografi. Bila bonus demografi di Indonesia yang dinikmati tahun 2020-2030 tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia, maka Indonesia akan mendapat petaka. Indonesia tidak akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, Indonesia masyarakatnya tidak akan lebih sejahtera, bahkan akan menjadi beban bagi negara Indonesia. Perencanaan sektoral dalam kependudukan (pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, pangan, dan lainnya) harus disiapkan. Ini agar tingginya jumlah penduduk yang mungkin terjadi pada 2050 tidak bermuara pada permasalahan. Sejatinya justru menuju terciptanya tujuan pembangunan seperti usia harapan hidup dan sehat, lebih berpendidikan, dan lebih terampil. Konsekuensi dari semakin membaiknya angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah akan semakin banyaknya jumlah penduduk yang dikategorikan lanjut usia (lansia). Pemerintah Indonesia harus bersiap diri sehingga penuaan penduduk di masa mendatang ini menjadi apa yang disebut dengan ‘bonus demografi kedua’.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D.S., Pitoyo, A.J., & Pangaribowo, E.H. (2013). Ketidaktercapaian Bonus Demografi: Pembelajaran dari Sumatera Barat. *Populasi*, 26(1), 1-15.
- Bapenas, BPS, & UNFPA.(2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS.
- Dewi,S., Listyowati,D., & Napitupulu, B.E. (2013). Bonus Demografi di Indonesia : Suatu Anugerah Atau Petaka. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 10(1), 37-44.
- Hajar, S., Lubis, A.R., & Lubis, P.H. (2018). Bonus Demografi di Indonesia : Suatu Anugerah Atau Petaka. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2(1), 46-57.
- Hasudungan, A.N. & Kurniawan,Y. (2018). *Meningkatkan Kesadaran Generasi Emas Indonesia dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 melalui Inovasi Digital Platform, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Unwaha. 29 September 2018*, 51-58.
- Hayati, B.N., & Alfana, M.A. (2016). Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Sleman Pasca Berakhirnya MDGs. *Natapraja*, 4(2), 127-136.
- Heryanah. (2015). Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia. *Populasi*, 23 (2), 1-16.
- Jati, W.R. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia? *Populasi*, 23(1), 1-19.
- Kemendikbud.(2017). *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*. Jakarta: Kemendibud.
- Mukri,S.G. (2018). Menyongsong Bonus Demografi Indonesia. *Journal Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, 2(6a), 51-52.
- Noor, Munawar. (2015). Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Bonus Demografi. *Serat Acitya*, 121-128.
- Rimbawan, N.D. (2013). Bali Diproyeksikan Mengalami Bonus Demografi Puncak 2020-2030 : Peluang atau Bencana? *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 10(1), 37-44.
- Sara. (2018). Indonesia dalam Ancaman Ledakan Penduduk? *Jurnal Keluarga*, 4, 4-5.
- Titisari,A.S.. (2017). Tren Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) Remaja Terhadap Isu Kependudukan. *Jurnal Piramida*, 14(1), 16-22.

Umar, M.A. (2017). Bonus Demografi Sebagai Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Otonomi Daerah. *Genta Mulia*, 8(2), 90-99.

Yusmarni, N.A. (2016). Analisis Bonus Demografi Sebagai Kesempatan dalam Mengoptimalkan Pembangunan Pertanian di Sumatera Barat. *AGRISEP*, 16(1), 67 – 82.